

### **ABSTRACT**

*This paper explores how one of the student unions in West Java organizes students to engage in supervising a policy making process. The study of student movement is important to show that students, as subjects of education, can get involved in overseeing education policies related to teaching and learning activities. The participatory research was conducted to see students who are able to build consensus without having to be overshadowed by the older generation and, in fact, the generation above them, learning together in the Jonggol Student Union. The Participatory Action Research method was deliberately chosen to show student involvement in the process of knowledge formation explored in this study. The findings of this study reveal that the educational hegemony that sees students solely as objects of educational policy hinders the possibility of student participation in overseeing educational policies that are attached to students. This stagnation was successfully broken by the Jonggol Student Union by building a new consensus through student movement and reflectively reinterpreting policies through public education. This study suggests that the government and other stakeholders should involve students in policy-making related to their learning process, instead of shackling student participation.*

**Keywords:** education policy; student participation; student organization; Jonggol Student Union; public education

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah memahami pengorganisasian siswa untuk terlibat dalam pengawalan kebijakan oleh salah satu serikat pelajar di Provinsi Jawa Barat. Pengkajian atas pengorganisasian siswa penting untuk menunjukkan bahwa siswa sebagai subjek pendidikan pada dasarnya dapat terlibat dalam pengawalan kebijakan pendidikan yang terkait dengan kegiatan belajar dan mengajar. Penelitian secara partisipatif ini dilakukan untuk melihat siswa yang mampu membangun konsensus tanpa harus dibayangi oleh generasi yang lebih tua dan justru generasi di atasnya ikut belajar bersama dalam Serikat Pelajar Jonggol. Metode *Participatory Action Research* sengaja dipilih untuk memperlihatkan keterlibatan siswa dalam proses pembentukan pengetahuan yang digali dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa hegemoni pendidikan yang melihat siswa semata-mata sebagai objek kebijakan pendidikan menghalangi kemungkinan munculnya partisipasi siswa dalam pengawalan kebijakan pendidikan. Kondisi ini berhasil diubah oleh Serikat Pelajar Jonggol dengan membangun konsensus baru melalui pengorganisasian siswa dan secara reflektif memaknai kembali kebijakan melalui pendidikan publik. Kajian ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya melibatkan siswa dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan proses pembelajaran mereka, bukannya membelenggu partisipasi siswa.

**Kata kunci:** kebijakan pendidikan; partisipasi siswa; organisasi siswa; Serikat Pelajar Jonggol; pendidikan publik

## PENDAHULUAN

Serikat Pelajar Jonggol mencoba menggulirkan pendidikan publik yang didorong oleh kesadaran siswa untuk kritis dan aktif dalam pembentukan subjek pendidikan di lingkungannya. Kelompok siswa ini secara aktif membuat kajian dan advokasi di media sosial yang berusaha mengungkapkan narasi pendidikan menurut versi mereka. Pengkajian atas Serikat Pelajar Jonggol menjadi penting untuk menunjukkan bahwa siswa sebagai subjek pendidikan pada dasarnya dapat terlibat dalam pengawalan kebijakan pendidikan yang terkait dengan kegiatan belajar dan mengajar. Hal tersebut membongkar sudut pandang yang melihat siswa semata-mata sebagai objek kebijakan pendidikan yang harus mengikuti kemauan otoritas sekolah.

Kajian-kajian sebelumnya secara normatif melihat wadah keaktifan siswa seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan ekstrakurikuler sebagai bentuk partisipasi, penanaman, maupun praktik nilai-nilai demokrasi. Kajian-kajian tersebut dibingkai dengan perspektif demokrasi prosedural seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dan Insan (2020) yang melihat partisipasi sebatas pada kebebasan individual secara formal dalam proses pemilihan, hak berserikat, maupun berbicara. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa secara normatif siswa dilibatkan dalam pemilihan ketua OSIS, tetapi sebenarnya tak lantas membentuk pemahaman siswa mengenai praktik berdemokrasi (Nurdin & Insan, 2020).

Kajian lain seperti yang dilakukan oleh Hamdi dkk. (2019) menunjukkan bahwa OSIS dilihat sebagai penanaman nilai demokrasi melalui tindakan-tindakan seperti menghargai hak individu untuk beribadah sesuai keyakinannya, kegiatan rapat yang saling menghormati pendapat, dan pembagian tugas secara jelas di antara pengurus serta anggota. Pendampingan dari sekolah terutama pembina OSIS, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan guru, dan motivasi siswa merupakan beberapa faktor yang mendukung penanaman nilai demokrasi. Sedangkan faktor yang dapat menghambat yaitu kurangnya dana dan tidak adanya izin dari orang tua siswa untuk mengikuti kegiatan OSIS (Hamdi dkk., 2019).

Lestari dan Yani (2016) menjelaskan bahwa OSIS juga menjadi wadah penanaman nilai demokrasi melalui kegiatan latihan upacara dan pelatihan baris berbaris (PBB). Kedua kegiatan

tersebut diklaim sebagai praktik budaya demokrasi yang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih peran yang diinginkan saat akan menjadi petugas upacara dan semua pengurus PBB memiliki kesempatan sama untuk mengamati sesamanya (Lestari & Yani, 2016). Penggunaan *e-voting* dalam proses pemilihan ketua OSIS juga dapat dilihat sebagai bentuk pendidikan publik bagi siswa meskipun terdapat kelemahan berupa risiko manipulasi suara (Ferah, 2021). Studi lainnya juga sebatas fokus pada pemilihan ketua OSIS yang diklaim sebagai praktik berdemokrasi dengan indikator yang hampir sama dengan bingkai demokrasi prosedural, yakni penggunaan hak pilih dan kebebasan mengemukakan pendapat dalam proses pemilihan (Sulita, 2019; Wibawa, 2020).

Di lain sisi Rohmah dan Sari (2018) mencoba melihat peran dari mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) pada salah satu sekolah di Bojonegoro yang dianggap mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi. Menurut Rohmah dan Sari (2018) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan Tujuan Pembelajaran yang berupaya mengajarkan nilai toleransi, keramahan, kepedulian, dan kerja sama. Ekstrakurikuler Olimpiade Wawasan Kebangsaan yang diikuti oleh siswa sesuai minatnya dianggap sebagai langkah penanaman nilai demokrasi yang berhubungan dengan pelajaran PPKn. Motif ekstrakurikuler tersebut sebenarnya semata untuk menyiapkan siswa dalam kompetisi Olimpiade Wawasan Kebangsaan setiap tahunnya (Rohmah & Sari, 2018).

Yanti dkk. (2016) mencoba menggali peranan ekstrakurikuler secara umum dalam pembentukan karakter di salah satu sekolah di Banjarmasin dan kenyataannya minat siswa dalam berkegiatan sangat minim ditunjukkan pada tingkat kehadiran di bawah sepuluh orang (Yanti dkk., 2016). Berdasarkan studinya pada kegiatan ekstrakurikuler salah satu sekolah di Semarang, Lestari (2016) mengklaim bahwa ekstrakurikuler adalah wahana pendidikan kewarganegaraan. Ekstrakurikuler mampu memupuk sikap siswa untuk jujur, gigih, memiliki patriotisme, toleransi dan taat pada hukum. Sebenarnya penanaman sikap tersebut lebih untuk mendorong siswa mampu mencapai visi misi yang sudah ditetapkan oleh birokrasi sekolah (Lestari, 2016).

Klaim partisipasi yang ada di dalam OSIS, ekstrakurikuler, maupun mata pelajaran pada dasarnya hanya sebatas formalitas dengan menjadikan siswa bagian dari proses rutinitas birokrasi. Misalnya terkait pengambilan keputusan dalam OSIS masih didasarkan atas suara terbanyak alih-alih mencoba membangun sintesis atas aspirasi, wacana, dan kepentingan berbeda dari tiap siswa. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut sebenarnya diskusi tak benar-benar terjadi secara aktif, sering kali minoritas diminta mengikuti mayoritas dan tidak ada upaya untuk menjembatani aspirasinya (Aulawi & Srinawati, 2019). Nyatanya OSIS belum mampu memantik inisiatif siswa untuk bertukar pengetahuan secara setara apalagi menyuarakan kebutuhan-kebutuhannya yang belum terlayani oleh birokrasi sekolah.

Pandangan yang melihat siswa sebagai pihak yang harus diintervensi justru menunjukkan wajah pendidikan yang hegemonik. Hegemoni sendiri adalah kendali kelas yang berkuasa atas pilihan pengetahuan yang dianggap wajar dan diperbolehkan untuk ditransmisikan kepada siswa dalam dunia pendidikan (Balampekou & Floriotis, 2012). Hegemoni dalam dunia pendidikan memicu berbagai protes di daerah. Tahun 2008 di SMAN 3 Surakarta, siswa yang tergabung dalam "tim 11" mengungkap dugaan penyelewengan dana oleh pejabat sekolah yang kemudian menyita perhatian Walikota Surakarta saat itu, Joko Widodo (detik.com, 2016). Maret 2015, puluhan siswa salah satu sekolah dasar di Lamongan melakukan protes hilangnya akses beribadah di sekolah akibat ruangan tempat sholat diubah menjadi kantor (liputan6.com, 2015). Kasus lain terjadi di Purbalingga, Siswa SMA melakukan protes kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai kebijakan lima hari sekolah yang dianggap membuat siswa kewalahan dengan kepadatan jam pelajaran (viva.co.id, 2015). Siswa salah satu SMK di Bangkalan melakukan mogok belajar dari tanggal 17 s.d. 23 November 2017 sebagai bentuk protes kenaikan biaya pendidikan di sekolahnya (radarmadura.jawapos.com, 2017).

Protes dilakukan pula oleh Siswa SMAN 1 Bangko di Rokan Hilir kepada pemerintah akibat kabut asap membuat mereka tak bisa belajar dengan tenang (momenriau.com, 2019). Tahun 2021, siswa di salah satu SMA di Bengkulu Utara menempelkan tulisan yang berisi pesan ketidaksetujuan pengangkatan kepala sekolah

baru di sekolahnya (lesungnews90.com, 2021). Protes juga pernah dilakukan oleh siswa salah satu SMA di Mataram yang menentang pungli parkir dengan dalih "infak" bagi program OSIS dan sumur bor (radarlombok.co.id, 2022). Juli 2022, siswa salah satu SMP di Pangkajene melakukan protes pencopotan kepala sekolah (rakyatsulsel.fajar.co.id, 2022). Masih di tahun yang sama, siswa SMP di Kota Bekasi melakukan protes setelah terungkapnya masalah pelecehan seksual yang dilakukan staf perpustakaan (bekasikinian.com, 2022).

Protes lainnya terjadi pada 5 September 2022, di mana siswa di salah satu SMK di Tulungagung melakukan demonstrasi terkait kenaikan iuran pendidikan bagi semua tingkatan pendidikan (tribunnews.com, 2022). Siswa SMA di Kabupaten Malang melakukan protes menuntut mutasi kepala sekolah yang dipandang bersikap arogan akibat menghambat kreativitas dalam pembelajaran (jatim.jpnn.com, 2022). Guru dan siswa salah satu SMP di Denpasar pada 20 Oktober 2022 melakukan protes kebijakan kepala sekolah baru yang tidak berpihak pada guru dan siswa (nusabali.com, 2022). Protes-protes di atas sayangnya bersifat reaktif, temporer, dan tak diikuti dengan pengawalan sampai penyelesaian apalagi mendorong pendidikan publik untuk memastikan siswa dapat terus mengawal kebijakan pendidikan.

Berbeda dengan studi maupun kasus-kasus sebelumnya, studi terhadap peran Serikat Pelajar Jonggol berupaya menunjukkan bahwa peran guru dan siswa yang saling berkolaborasi dapat menghasilkan proses pertukaran pengetahuan secara setara bahkan mampu memberikan sarana alternatif bagi proses pembelajaran sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara. Pendalaman atas peran Serikat Pelajar Jonggol dibingkai dengan sudut pandang ekonomi politik dari Antonio Gramsci yang meletakkan peran intelektual organik dalam membongkar jerat struktural. Analisis ekonomi politik atas dunia pendidikan harus kita mulai dengan pemahaman atas aspek suprastruktur. Suprastruktur menjadi akar dari reproduksi pengetahuan kelas yang menghegemoni dan mendefinisikan serta mengatur pengetahuan mana yang dapat dijalankan oleh sekolah dan ditransmisikan ke siswa (Balampekou & Floriotis, 2012).

Gramsci (dalam Balampekou & Floriotis, 2012) melihat bahwa ilmu pengetahuan semestinya

menjadi instrumen membongkar dan menjadi pilihan alternatif dari pengetahuan kelas sosial yang hegemonik. Pendidikan dalam kacamata Gramsci harus mampu memfasilitasi rakyat sebagai *subaltern*/kelas marginal untuk mampu membangun basis pengetahuannya sendiri dalam memahami realitas sekaligus mengintervensi realitas sesuai kebutuhan sosial mereka. Dengan demikian, kaca mata Gramsci akan membantu kita untuk memahami peran Serikat Pelajar Jonggol dalam mendorong perubahan sosial sesuai kebutuhan peserta didik dan guru yang terlibat di dalamnya. Pemahaman atas aspek suprastruktur dalam pendidikan seperti kurikulum, pola manajemen pendidikan, relasi pemangku kepentingan, serta struktur ekonomi politik yang terkait dengan operasional sekolah harus digali untuk mendefinisikan hegemoni dunia pendidikan yang dibentuk oleh kelas sosial yang berkuasa.

Pemahaman di atas membantu penulis untuk mendefinisikan pertanyaan penelitian pertama yang berusaha dijawab dalam penelitian ini, yakni “Bagaimana kondisi struktural pendidikan yang menghambat munculnya keterlibatan siswa dalam pendidikan publik?”. Pendidikan publik yang dimaksud adalah kemampuan siswa untuk menentukan dan terlibat dalam proses produksi pengetahuan maupun pembelajaran (transmisi pengetahuan) sesuai kebutuhan serta mengawal penyelenggaraan pendidikan yang berdampak pada mereka.

Hegemoni dunia pendidikan kemudian dilawan dalam bentuk pendidikan publik seperti yang dilakukan Serikat Pelajar Jonggol. Hambatan yang muncul dalam pelibatan siswa untuk menembus hegemoni dunia pendidikan dirasa sebagai bentuk kekangan dari otoritas, struktur sosial, serta guru atas pilihan pengetahuan yang dianggap wajar (Manojan, 2019).

Terobosan yang dilakukan oleh Serikat Pelajar Jonggol merupakan satu-satunya jalan yang dapat dipilih untuk melangsungkan pendidikan publik, setidaknya bagi mereka. Penerobosan ini artinya tak hanya menjadi bentuk “pedagogi kritis” seperti dalam kajian Manojan (2019), tetapi telah menjadi gerakan sosial yang dilakukan siswa. Keberadaan Serikat Pelajar Jonggol merupakan bentuk pendidikan melalui pembentukan konsensus. Dengan demikian, langkah pendidikan publik yang dilakukan oleh Serikat Pelajar Jonggol adalah praksis

dari “belajar bersama dan bertindak setara” (Manojan, 2019).

Pertanyaan kedua dalam kajian ini tentang bagaimana langkah penerobosan hegemoni pendidikan yang dilakukan oleh Serikat Pelajar Jonggol. Penggalan atas upaya penerobosan menjadi penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang digunakan oleh siswa adalah realitas kehidupan mereka sehari-hari dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendidikan publik adalah istilah yang dipakai penulis untuk menyederhanakan istilah konter hegemoni yang dipakai Gramsci untuk menjelaskan langkah kelas marginal dalam proses pertukaran pengetahuan secara setara (Mayo, 2014).

Riset ini juga mencoba melihat pemangku kepentingan dunia pendidikan bukan sebatas sebagai relasi aktor ataupun pembagian peran dalam kerangka institusi, melainkan memahami bahwa pendidikan itu sendiri adalah wahana dialektika antara berbagai kelas-kelas sosial yang berbeda (Mayo, 2014). Hal tersebut penting untuk menggali bahwa sudah seharusnya penyelenggaraan pendidikan menjadi proses pertukaran pengetahuan secara setara. Partisipasi siswa tercermin dalam langkah konter hegemoni, gugatan atas relasi hegemonik, dan pendidikan publik itu sendiri untuk “menandingi” hegemoni.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode PAR (*Participatory Action Research*) atau disebut juga kaji tindak partisipatif. Lokus dari PAR dalam studi ini adalah Serikat Pelajar Jonggol bersama dengan lingkungan pendidikannya (sekolah) yang menjadi tempat untuk menopang perkembangan siswa dalam hubungan sosial, pendidikan publik maupun pengembangan minat (Ozer dkk., 2010). Serikat Pelajar Jonggol adalah sebuah kelompok studi yang didirikan pada 11 Mei 2022. Delapan orang siswa sekolah menengah atas dan tiga orang guru muda berasal dari sekolah yang berbeda dengan latar belakang disiplin yang berbeda. Aktivitas utama kelompok ini adalah diskusi/kajian langsung dan advokasi isu-isu kontemporer soal pendidikan di media sosial Instagram. Penelitian secara partisipatif ini dilakukan untuk melihat siswa yang mampu membangun konsensus tanpa harus dibayangi oleh generasi yang lebih tua dan justru generasi di atasnya ikut belajar bersama

dalam Serikat Pelajar Jonggol.

Metode PAR sengaja dipilih untuk memperlihatkan keterlibatan siswa dalam proses pembentukan pengetahuan yang digali dalam penelitian ini. PAR dipilih untuk memastikan bahwa proses pengkajian adalah bagian dari proses pendidikan publik di dalam wadah pengorganisasian itu sendiri, sehingga tidak ada yang dinamakan objek. Metode PAR dipilih untuk memosisikan Serikat Pelajar Jonggol sebagai bagian dari proses pengkajian ini dan masih terkait pula dengan upaya perubahan sosial yang ingin disokong oleh gerakan tersebut. Artinya, penelitian ini berupaya melampaui tujuan untuk sekadar tahu, melainkan untuk menjadi bagian dari bentuk konter hegemoni dunia pendidikan Indonesia (Ozer dkk., 2010).

Penelitian ini memosisikan penulis pertama yang berasal dari Serikat Pelajar Jonggol sekaligus guru yang menjadi bagian mereka sebagai pihak yang tak hanya melakukan kegiatan dokumentasi atas seluruh kegiatan, melainkan juga aktif menyusun kegiatan, menginisiasi gerakan, serta melakukan pendidikan publik. Penulis kedua pada kajian ini membantu memberikan kerangka ekonomi politik terutama dalam hegemoni dunia pendidikan yang berdampak pada kesulitan siswa dalam membangun pendidikan publik dan hanya diposisikan sebagai objek indoktrinasi dan penyelenggaraan pendidikan (Ozer dkk., 2010).

Kerangka di atas memengaruhi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan PAR. Pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan melibatkan siswa-siswa yang tergabung dalam Serikat Pelajar Jonggol. Penulis pertama menjadi bagian dari Serikat Pelajar Jonggol yang juga menginisiasi gerakan tersebut sampai dengan mengikuti kegiatan sebagai bentuk pengumpulan dan proses pembentukan pengetahuan yang akan dideskripsikan dalam kajian ini. Penulis kedua sebagai *outsider* mencoba ikut membangun empati kepada gerakan siswa dengan melakukan pengumpulan data melalui penggalan atas artikel jurnal, laporan penelitian, *book chapter*, laporan lembaga maupun pemberitaan media terkait kondisi ekonomi politik yang kemungkinan menjerat siswa dalam melakukan pengawalan penyelenggaraan pendidikan.

Analisis data dilakukan sejak penentuan topik studi, perancangan, hingga penulisan hasil kajian. Analisis data dilakukan melalui refleksi

atas gerakan yang dilakukan bersama para siswa dalam menjalankan pendidikan publik serta penggalan terhadap hegemoni dunia pendidikan yang membelenggu suara-suara kritis dari siswa. Hal tersebut membantu memosisikan letak penerobosan Serikat Pelajar Jonggol bersama kondisi struktural yang membelenggu mereka (Gaffney, 2008).

PAR tidak harus selalu menjadi bagian dari subjek yang dikaji, melainkan juga menjadi mitra setara yang ikut berempati terhadap gerakan seperti posisi yang dilakukan penulis. Penggunaan PAR tidak berbeda antara peneliti dan yang diteliti karena penulis berupaya membangun empati serta mengingat kembali pengalamannya sebagai siswa yang juga pernah terjerat hegemoni dunia pendidikan. Setiap subjek penelitian memiliki kontribusi sama dengan cara yang berbeda-beda. Poin penting dalam melakukan PAR adalah berupaya peka dan menindaklanjuti fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian (Gaffney, 2008). Tujuan PAR yaitu memastikan gerakan tetap terus ada dan tumbuh dalam melakukan pendidikan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tentang Serikat Pelajar Jonggol: Dari *Private Troubles* Menjadi *Public Issues*

“Kelas di sekolah kok kerasa intimidatif ya a, kalo saya punya ide-ide yang beda dan ‘liar’ gitu. Guru-guru di kelas saya nih kayak gak bisa akomodasi ide-ide beda gitu. Saya ngerasa gak ada tempat buat diskusi dan memenuhi keingintahuan saya ke hal-hal yang sebenarnya terjadi di masyarakat.” (Dani Ardian, Penggagas Serikat Pelajar Jonggol)

Serikat Pelajar Jonggol adalah kelompok studi yang berupaya secara kolektif membangun ruang diskusi bagi pelajar yang memiliki keresahan utama atas tak tersedianya ruang diskusi yang setara dan bebas. Diinisiasi oleh Dani Ardian (siswa kelas XII IPS sekolah menengah atas) pada 11 Mei 2022, Serikat Pelajar Jonggol menjadi komunitas bagi pelajar untuk berdiskusi bebas tentang pendidikan menurut versi mereka, yang tidak mungkin dilakukan di sekolah.

Berbeda dengan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan organisasi ekstrakurikuler (Ekskul) yang menjadi bagian dalam sistem sekolah, serikat pelajar ini mendefinisikan diri sebagai

entitas yang berada di luar sistem sekolah. Serikat Pelajar Jonggol merupakan komunitas organik yang terdiri dari delapan orang siswa sekolah menengah atas dan tiga orang guru muda dengan latar belakang, agama, gender, asal sekolah, dan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Dalam pola organisasinya, Serikat Pelajar Jonggol menyadari untuk tidak mengenal struktur hierarki organisasi. Sehingga penulis melihatnya sebagai komunitas guyub yang setara, termasuk pudarnya relasi “guru-murid”, hal yang tidak bisa ditemukan di OSIS/ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lain. Keterbukaan dan kesetaraan yang diperlihatkan komunitas ini, termasuk keberadaan tiga orang guru muda yang memosisikan diri sebagai kolega setara dan pemantik ruang kritis, mendorong popularitas gerakan sosialnya.

Dua tahun terakhir, Serikat Pelajar Jonggol selalu membuat diskusi publik dengan latar belakang pengalaman-pengalaman personal (*private troubles*) mereka di sekolah seperti kurikulum dan tugas-tugas mata pelajaran yang membebani, pungutan liar, intimidasi di kelas, dan kekerasan seksual. Setiap pengalaman subjektif yang dimiliki oleh masing-masing anggota komunitas selalu dimaknai oleh Serikat Pelajar Jonggol sebagai masalah publik (*public issues*) melalui diskusi publik dan advokasi isu di media sosial. Hingga saat ini, gerakan sosialnya tetap berjalan secara organik berdasarkan pengalaman dan refleksi setiap anggota komunitasnya.

Serikat Pelajar Jonggol mengorganisasikan ide, pemikiran, dan aspirasinya melalui dua saluran utama yaitu diskusi publik dan advokasi isu di media sosial. Aktivitas utama Serikat Pelajar Jonggol adalah *focus group discussion* (FGD) sebagai sumber refleksi pengalaman, riset, *brainstorming*, dan identifikasi isu. Biasanya FGD dilakukan secara informal di tempat makan atau warung kopi. Hasil “ngopi” itulah yang kemudian menjadi tema diskusi publik dan tulisan-tulisan advokasi di media sosial.

Aktivitas di media sosial tidak hanya menarik perhatian siswa, tetapi juga guru senior, bahkan pejabat sekolah di lingkungan sekitarnya. Ide dan aspirasinya mendapatkan sorotan publik, baik di media sosial maupun dari sekolah-sekolah. Persepsi publik tentang Serikat Pelajar Jonggol bervariasi. Publik “media sosial” cenderung melihat komunitas ini dengan positif (kreatif).

Jumlah pengikut akun Instagram Serikat Pelajar Jonggol sebanyak 207 (saat artikel ditulis). Namun publik “sekolah” melihat komunitas ini sebagai ancaman terhadap stabilitasnya, terutama setelah publikasi artikel tentang pungutan liar dan video *reels* tentang kekerasan seksual di sekolah terbit.



Gambar 1 Publikasi Artikel dan *Reels* Instagram  
Sumber: instagram @serikatpelajarjonggol

Respons reaktif dari publik “sekolah” terhadap artikel tentang pungutan liar dan *reels* kekerasan seksual di sekolah yang diorganisasikan oleh Serikat Pelajar Jonggol menciptakan relasi antagonisme antara publik “sekolah” dan Serikat Pelajar Jonggol. Publik “sekolah” melihat aktivitas yang dilakukan komunitas ini seperti “duri dalam daging” yang suatu saat dapat mengganggu stabilitas dan merusak citra persekolahan. Terutama karena anggota komunitas ini adalah warga sekolah baik guru maupun siswa yang berasal dari sekolah berbeda. Respons reaktif berupa teguran yang dilakukan beberapa sekolah terhadap siswa yang terlibat dalam komunitas ini dimaknai oleh Serikat Pelajar Jonggol sebagai manifestasi hegemoni.

### Hegemoni Dunia Pendidikan sebagai “Belunggu”

Gramsci menjelaskan bahwa kesadaran kelas dari kelompok yang termarginalkan tidak akan mampu tumbuh tanpa adanya pembongkaran dari apa yang dialami dan perebutan kendali negara dalam hal pendidikan. Pembongkaran atas hegemoni yakni sifat relasional dari berbagai perangkat-perangkat pendidikan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk mendoktrin pengetahuannya menjadi pijakan awal untuk memahami pengendalian dalam proses pembelajaran (Mayo, 2015c).

Hegemoni itu yang menghalangi kemungkinan munculnya pendidikan publik (“perang posisi”

dalam bahasa Gramsci) yang semestinya ada untuk memastikan kaum marjinal mampu menjadikan apa yang dihadapinya sebagai sumber pengetahuan dan bagian proses pendidikan. Gramsci menggunakan istilah intelektual organik untuk menyebut mereka yang berupaya melawan hegemoni itu dengan memastikan adanya konsensus dari kaum marjinal dalam pendidikan publik sampai memastikan keterlibatan mereka (Mayo, 2015c). Serikat Pelajar Jonggol berada dalam koridor intelektual organik yang mencoba menerobos belenggu dunia pendidikan.

Belenggu dunia pendidikan itu dapat kita lihat dari kurikulum, tata kelola dunia pendidikan sampai dengan proses pengajaran yang tak melihat peran siswa. Hegemoni dunia pendidikan tak hanya memosisikan siswa untuk tunduk pada negara, melainkan harus menjadi bagian dari logika kompetisi pendidikan (Mayo, 2015c).

Pemahaman awal mengenai pendidikan hegemonik menjadi penting sebelum kita menggali fitur-fitur yang membelenggu pendidikan dan menjerat siswa Indonesia. *Pertama*, memahami bahwa pemerintah berupaya menyebarkan pengetahuan “kewarganegaraan yang baik” berdasarkan kehendak kelas yang berkuasa, misalnya mengikuti upaya mengejar tingkat melek huruf, menggunakan bahasa kesatuan, dan pengetahuan lainnya yang mengesampingkan konteks kebutuhan di akar rumput (Mayo, 2015b). Akibatnya justru rentan membawa pengetahuan yang seksis, rasis, dan bias kelas. Pengetahuan yang tak melihat kebutuhan menjadi wujud dari realitas tentang kelas atas yang bisa memengaruhi kebijakan.

*Kedua*, memahami bahwa pendidikan disiapkan dan dikendalikan sebagai bentuk reproduksi kelas pekerja oleh kelas yang berkuasa, untuk memastikan tersedianya angkatan kerja yang “takluk” pada kelas atas (kuasa). Pengetahuan yang disebarkan akibatnya berupaya untuk memastikan siswa sebagai calon kelas pekerja terbiasa bersaing dalam pembelajaran dan harus mengikuti kebutuhan pasar tenaga kerja, alih-alih mampu mendefinisikan sendiri kebutuhan penghidupannya ke depan (Mayo, 2015b).

*Ketiga*, pendidikan pada dasarnya juga menjadi instrumen bagi kelas sosial yang berkuasa untuk melakukan reproduksi struktur kebudayaan yang dipegangnya. Pendidikan sering kali menjadi

perangkat untuk menonjolkan konstruksi gender yang bias seperti menjunjung maskulinitas serta menyudutkan perempuan sebagai pihak yang lemah, ekspresi kebudayaan yang diamini oleh kelas atas, dan yang lain (Mayo, 2015b). Pendidikan bahkan menjadi cara untuk menentukan sikap siswa berdasarkan konstruksi kebudayaan yang bias.

Perangkat kekuasaan menjadi kerangka fitur-fitur pendidikan di Indonesia dimulai pada masa Presiden Soekarno yang berupaya menjadikan sekolah sebagai alat pemersatu tanpa memandang identitas sosial. Soekarno mulai mendorong perluasan layanan pendidikan dan pelatihan guru dengan menekankan struktur pengetahuan yang menonjolkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu dan golongan (Faisal & Martin, 2019).

Kurikulum awal kemerdekaan dimulai tahun 1947 dengan muatan yang masih dipengaruhi pendidikan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kurikulum 1947 tidak menekankan aspek kognitif, melainkan berupaya mendoktrin siswa sebagai anggota masyarakat dan diberikan materi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berfokus pada seni dan olahraga (Alhamuddin dkk., 2020). Kurikulum direvisi pada tahun 1952, menerapkan dan mengaitkan rencana pembelajaran dengan materi kehidupan sehari-hari. Kurikulum dikembangkan kembali pada tahun 1974 dan mulai menyentuh aspek akademik sebelum masuk Sekolah Dasar (SD). Kurikulum menekankan pada aspek kegiatan praktis dan pengetahuan dengan bingkai doktrin Sosialisme Indonesia sampai terjadinya peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober) pada 1 Oktober 1965 (Alhamuddin dkk., 2020).

Pergantian rezim di bawah kekuasaan Soeharto mendorong dimulainya langkah lain berupa pengembangan sekolah INPRES (Instruksi Presiden Republik Indonesia) sejak tahun 1973 sebagai respons atas peningkatan kebutuhan umum. Tahun 1994, pemerintahan Soeharto mendorong wajib belajar 9 tahun bagi siswa. Di tahun yang sama, pemerintahan Soeharto berupaya mengambil langkah desentralisasi pendidikan seperti memberikan kursus sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal (Faisal & Martin, 2019).

Orde Baru (Orba) di bawah kendali Soeharto menggunakan pendidikan untuk mengendalikan “pemikiran liar” di masyarakat. Pendidikan mulai

dijadikan sarana untuk melakukan kontrol fisik, gagasan dan mental siswa mulai dari seragam, substansi pelajaran, dan pengawasan perilaku individu menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan. Orba juga mengadakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk memastikan siswa dan guru mengikuti ideologi negara (Sunarso, 2020).

Sejak tahun 1999, pemerintah menerapkan desentralisasi yang semakin luas dan memberikan otonomi kepada sekolah dan guru. Pemerintah Indonesia pascaperalihan rezim dari Orba, tahun 2004, mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang menekankan kemampuan siswa dalam menjawab tantangan global. Guru diminta menyesuaikan pembelajaran berkebutuhan global dengan konten lokal yang mereka hadapi (Faisal & Martin, 2019). Tahun 2006, pemerintah merevisi kurikulum menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk memberikan konten pengajaran dengan menyusun bahan ajar, instrumen penilaian, dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sesuai standar nasional.

Tahun 2013, pemerintah Indonesia mulai mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Pendidikan dasar diselenggarakan gratis, sedangkan untuk pendidikan tingkat menengah pengguna layanan diminta menanggung biaya minimum. Pemerintah juga mengembangkan Kurikulum 2013 untuk memperkuat penyiapan siswa dalam pasar tenaga kerja, memperkuat kesadaran, dan menghargai nilai sosial-budaya (Faisal & Martin, 2019).

Kurikulum yang dikembangkan sejak masa Soeharto memang berupaya mendorong siswa memiliki kemampuan pada bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, Math*). Kurikulum pada masa Pasca-Orba ini berupaya menyeimbangkan aspek penyiapan siswa sebagai calon tenaga kerja dengan kebutuhan pembelajaran yang bersifat akademik (Faisal & Martin, 2019).

Kurikulum Merdeka diterapkan sejak tahun 2021 sebagai respons atas situasi pandemi Covid-19 dan berupaya menekankan keleluasaan sekolah dalam proses pembelajaran. Pemerintah memulai pelaksanaannya melalui Program Sekolah Penggerak, yaitu sekolah dengan kepala sekolah yang sudah diberikan penguatan

implementasi Kurikulum Merdeka dengan fokus untuk mendorong satuan pendidikan melakukan perubahan lebih baik. Studi Rahayu dkk., (2022) menunjukkan bahwa Sekolah Penggerak tidak mempertimbangkan aspek sarana dan prasarana/fasilitas sekolah, tetapi berdasarkan kemampuan otoritas sekolah dalam memajukan pendidikan.

Kurikulum Merdeka berupaya membentuk siswa memiliki kompetensi dan karakter berdasarkan Profil Pelajar Pancasila. Ujian Nasional dihapus dan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Sekolah diberikan keleluasaan dalam penyederhanaan RPP, penekanan penerimaan calon siswa dengan zonasi dan penyelenggaraan ujian berstandar nasional. Kenyataannya, penerapan Kurikulum Merdeka justru menambah beban guru karena harus mengunggah administrasi secara digital maupun dalam penggunaan alat pembelajaran (Rahayu dkk., 2022). Studi dengan temuan hampir sama dilakukan oleh Saputra dkk. (2022) yang juga menemukan hambatan guru dalam menggunakan teknologi digital dan memahami paradigma pembelajaran.

Studi lain yang dilakukan oleh Hadian dkk., (2022) di salah satu sekolah di Sukabumi menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka sering kali hanya melibatkan segelintir guru pembimbing, staf kurikulum, dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran juga masih minim dan tidak didukung dengan sumber daya yang memadai (Hadian dkk., 2022).

Fitur lain yang tak kalah penting dalam pendidikan yang hegemonik adalah peningkatan kapasitas guru dalam mentransfer pengetahuan dari suprastruktur kepada siswa. Peningkatan kapasitas guru dilaksanakan secara formal di luar sekolah dan pola informal yang dilakukan dalam pertemuan di sekolah. Studi yang dilakukan oleh Rahman (2021) menunjukkan bahwa hanya guru yang berada dekat dengan ibu kota kabupaten atau memiliki koneksi dengan pemerintah daerah saja yang sering mendapat pelatihan formal. Ketimpangan akses terlihat dari beberapa guru yang memiliki privilese berupa jam partisipasi pelatihan yang tinggi (Rahman, 2021).

Pelatihan formal juga tak lepas dari jejaring MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan kenyataannya lebih banyak berfokus pada tugas, seperti penyelesaian silabus bukan





Gambar 2 Reaksi terhadap Hegemoni Pendidikan oleh Serikat Pelajar Jonggol  
 Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023

kepada inovasi pembelajaran. Studi Rahman (2021) menunjukkan bahwa pelatihan tak lantas membuat kemampuan guru dalam pengajaran menjadi lebih baik. Selain itu, tidak ada pendampingan pascapelatihan sehingga guru harus mencerna sendiri apa yang dipelajari.

Keterkaitan dunia pendidikan dengan struktur sosial juga menyebabkan guru berkelindan dengan kepentingan ekonomi politik dari kelas atas. Jika pada masa Orba guru dimobilisasi ke dalam Golkar, maka pasca-Orba guru dipolitisasi oleh elite lokal (guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah). Studi Pierskalla dan Sacks (2019) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perekrutan guru honorer dan sertifikasi guru menjelang masa pemilihan umum.

Fitur pendidikan hegemonik lain yang tak kalah penting adalah tata kelola pendidikan, di mana setelah Orba diterapkanlah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Gambaran ideal MBS adalah berupaya memberikan keleluasaan pada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum juga melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Dewan pendidikan di level kabupaten dan komite sekolah di level sekolah dibentuk untuk memfasilitasi partisipasi.

Kajian yang dilakukan oleh Rini dkk., (2019) menunjukkan bahwa orang tua siswa mengaku sudah dilibatkan dalam penentuan renovasi dan perawatan fasilitas sekolah, namun belum

dilibatkan dalam pemilihan kepala sekolah, guru, konten buku, dan kurikulum. Studi lain yang dilakukan oleh Triwiyanto dkk., (2017) menemukan bahwa peran komite sekolah dalam pembuatan kebijakan masih minim di mana orang tua dan wakil masyarakat tak berdaya menghadapi birokrasi sekolah. MBS sebenarnya juga tak lebih dari langkah mendorong sekolah mencari uang ekstra untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan (Triwiyanto dkk., 2017).

Celah di dalam belunggu hegemoni pada dasarnya tetap ada yang memungkinkan upaya penerobosan untuk membangun konsensus lain. Kategori sosial siswa pada dasarnya menjadi salah satu bentuk masyarakat sipil yang menjadi medan perebutan hegemoni oleh berbagai kelas sosial. Keberadaan Serikat Pelajar Jonggol adalah bentuk proses organisasi siswa untuk membangun aliansi sosial dengan kelompok lainnya, demi kepentingan bersama dalam pendidikan (Mayo, 2015a). Serikat Pelajar Jonggol berupaya membangun basis pengetahuannya sendiri untuk setidaknya melawan pendidikan ala pemerintah yang justru membelunggu ruang belajar mereka untuk bereksplorasi dan terlibat lebih jauh dalam urusan publik. Keberadaan kurikulum, manajemen, relasi *stakeholder*, peran guru, struktur ekonomi politik yang memunculkan reaksi kritisisme dengan munculnya Serikat Pelajar Jonggol kurang lebih dapat ditunjukkan melalui gambar 2.

### Agensi Serikat Pelajar Jonggol dalam Menerabas “Belenggu” Pendidikan

Proses partisipasi secara langsung membantu penulis berefleksi atas keberadaan Serikat Pelajar Jonggol. Tidak hanya itu, refleksi ini memungkinkan penulis untuk mendokumentasikan agensi pelajar dalam mengelaborasi pengalaman dan pemahamannya. Operasionalisasi konsep hegemoni Gramsci membantu penulis mendokumentasikan agensi pelajar sebagai upaya “konter hegemoni” yang dilakukan siswa dalam dunia pendidikan. Konter hegemoni yang dimanifestasikan dalam sebuah pendidikan publik.

Dalam proses partisipasi langsung inilah penulis mendokumentasikan agensi pelajar dan bagaimana kesadarannya tentang pendidikan yang hegemonik mendorong lahirnya Serikat Pelajar Jonggol sebagai konter hegemoni.

“Kalo di kelas malah jadi bosan karena kayak cuma memindahkan pengetahuan dari modul-modul yang kita *download*. Saya ada beberapa teman yang punya keresahan sama, pengen banget punya tempat yang kita bisa bebas mendiskusikan apapun yang menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidup kita sebagai pelajar. Saya pengen ikut mengetahui sebenarnya yang terjadi di masyarakat tuh apa dan kita siswa gak pernah tahu apa-apa selain modul dari guru” (L, usia 17 tahun, anggota Serikat Pelajar Jonggol).

Agensi pelajar lahir sebagai respons atas ketidakberdayaannya dalam pengendalian suprastruktur.

“Kurang lebih dalam kegiatan itu kita pengen buat satu seri diskusi tematik tentang realitas pendidikan yang kita alami selama ini. Realita-realita kayak misal guru yang intimidatif ke siswa, kurikulum yang gonta-ganti, beban PR yang mencekik dan proses kelas yang searah terus.” (L, usia 17 tahun, anggota Serikat Pelajar Jonggol).

Ruang kelas seharusnya menjadi tempat yang aman untuk menyampaikan pendapat dan memupuk pikiran kritis, namun kenyataannya kelas telah menjadi ruang yang menakutkan dan intimidatif untuk ide dan “pikiran liar” muncul. Kekerasan dan intimidasi muncul bersamaan dalam hubungan yang tidak setara antara guru dan murid yang terus menerus direproduksi secara sistemik oleh budaya pendidikan. Realitas

ini berhasil didefinisikan oleh Serikat Pelajar Jonggol sebagai masalah substansial yang menjadi bagian dari belenggu pendidikan.

Sekolah yang dimaknai sebagai suatu sistem yang “sudah jadi” dan “tetap”, menjadi belenggu bagi agensinya. Tampak dengan jelas dalam analisis suprastruktur di awal bahwa pendidikan membangun hegemoninya melalui instrumen-instrumen kekuasaan yang bersifat relasional, seperti kurikulum, metode pengajaran, pengujian standar, instrumen evaluasi, peran teknologi, dan lain-lain. Hegemoninya bekerja melayani kepentingan reproduksi kelas sosial. Sehingga upaya-upaya perubahan yang terjadi merupakan bagian yang melekat dengan hegemoni tersebut. Sedikit bahkan nyaris tidak ada narasi publik yang memikirkan krisis sekolah semacam ini dan melakukan penerobosan yang bersifat diskursif atau masalah-masalah metafisika dalam pendidikan (jika menggunakan konsep yang dipikirkan oleh Postman (1995)).



Gambar 3 Ilustrasi Kritik terhadap Kondisi Sekolah  
Sumber: Instagram @serikatpelajarjonggol

Neil Postman (1995) berargumen bahwa pendidikan telah menjadi publik bukan karena memiliki kepentingan publik yang sama, akan tetapi pendidikan telah menjadi publik karena memiliki “tuhan” yang sama (Postman, 1995). Tuhan yang dimaksud adalah kepentingan kekuasaan untuk mempertahankan reproduksi sosial yang menggerakkan pendidikan. Tuhan yang dimaksud oleh Postman inilah yang membuat pelajar tidak lagi memiliki keamanan dan kebebasan untuk mendiskusikan hal-hal yang mereka anggap penting dan melekat dengan kehidupannya. Krisis itu berhasil dilihat oleh siswa dalam Serikat Pelajar Jonggol secara kritis, bahwa ruang-ruang

kelas telah “mati” sejak lama. Sensitivitas Serikat Pelajar Jonggol mampu merasakan bahwa siswa tidak terlibat dalam penentuan hal-hal penting. Krisis ini didefinisikan sebagai belenggu dan Serikat Pelajar Jonggol lahir dalam konteks sosiologis yang spesifik dengan tujuan menerobos belenggu itu.

#### a. Pendidikan Publik sebagai Konter Hegemoni

Refleksi pelajar terhadap setiap kegiatan tidak hanya memperlihatkan bagaimana pendidikan publik ini menjadi katalog bagi pengalaman dan pemahaman siswa tentang situasi pendidikan, akan tetapi lahir sebagai ruang kritis yang berhasil memperlihatkan ketidakberdayaan pelajar atas pengendalian sistemik pendidikan.

“Bagi saya kegiatan ini semacam oasis yang berhasil memberikan alternatif ruang yang aman bagi kita untuk menceritakan hal-hal tabu yang tidak bisa kita ungkapkan di ruang kelas. Pengalaman pribadi yang saya alami dalam konteks ini misal, kalian sadar gak sih kalo kita sudah lama terjebak dalam ke’sakral’an buku paket yang dicetak oleh Erlangga. Kelas-kelas yang berjalan kadang begitu menakutkan bagi kita yang punya pandangan berbeda dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimuat dalam buku paket itu.” (P, usia 16 tahun, anggota Serikat Pelajar Jonggol)

Pendidikan publik semacam ini menjadi tempat yang mereka yakini tepat untuk menyimpan dan mencurahkan berbagai pengalaman personal (*private troubles*) yang menghimpit dan mengubahnya menjadi masalah publik (*public issues*).

“Padahal redaksinya kan sumbangan. Tapi saya ditagih-tagih terus, orang tua saya sekarang lagi ada masalah keuangan jadi bagi keluarga saya berat banget untuk melunasi ‘hutang sumbangan’ itu. Pihak TU kan kadang gak mau tau, bahkan mereka ngancem ijazah saya bakal ditahan kalo saya gak melunasinya. Ah saya mah bodo amat deh, kemaren udah bilang ke orang tua. Biarin atuh Mah, gak punya uang ya mau gimana. Nah yang membuat saya tertarik dengan kondisi ini, Komite Sekolah tuh justru berperan kaya ‘tukang stempel aja’ buat memuluskan pungutan-pungutan yang kadang-kadang kita gak merasakan manfaat dari sumbangan itu.” (L/17)

Ruang kritis tercipta di saat bersamaan dengan lahirnya katalog pengalaman dan pemahaman siswa tentang hal-hal yang melekat dengan kehidupannya sebagai pelajar. Sebagai sebuah instrumen kekuasaan, kurikulum menjadi bagian yang melekat dengan siswa. Pengalaman dan pemahaman siswa tentang kurikulum tercatat dalam pendidikan publik sebagai produk diskursif.

“Saya sekarang kelas X, kadang saya gak ngerti kalo kita diminta nyatet banyak banget sampe belasan halaman gitu, dan sedihnya apa yang kita tulis itu gak dibaca, pas dikoreksi pun kaya cuma dikebet-kebet gitu. Belum ngerti aja letak kemerdekaan belajar dari Kurikulum Merdeka itu di bagian mana, karena yang saya rasain malah makin penuh tuntutan kaya misal sekarang kita punya tugas proyek yang mengurus waktu dan energi, sementara tugas-tugas setiap mapel gak berkurang malah kaya makin banyak aja. Ya emang sih, saya terlihat kaya orang males menerima tugas, jadi curhat nih. Tapi mumpung pada curhat sekalian deh saya ceritain uneg-uneg.” (P, Usia 16, anggota Serikat Pelajar Jonggol)

Kendali siswa terhadap apa yang harus ditransmisikan (*transfer of knowledge*) dalam pendidikan publik lebih dominan. Agensinya tidak hanya dalam ranah mendefinisikan krisis atau melawan ketidaksetaraan di dalam ruang kelas, tetapi juga menentukan pengetahuan apa yang harus mereka ketahui. Penentuannya berdasarkan pendefinisian krisis dari realitas pendidikan yang mereka alami sendiri. Penentuan ini adalah puncak perlawanan dalam penerobosan hegemoni pendidikan yang dilakukan oleh Serikat Pelajar Jonggol.



Gambar 4 Ilustrasi Kritik terhadap Kurikulum  
Sumber: Instagram @serikatpelajarjonggol

Serikat Pelajar Jonggol bukan sebatas melakukan transmisi pengetahuan hegemonik untuk kepentingan reproduksi kelas sosial seperti di ruang-ruang kelas konvensional. Terlihat manifestasi konter hegemoni pendidikan yang selalu memperlakukan siswa sebagai objek pasif pendidikan. Dalam proses ini, pendidikan dan prosesnya telah menjadi publik karena hal-hal yang harus ditransmisikan telah dimaknai ulang oleh siswa. Dengan kata lain, siswa dalam Serikat Pelajar Jonggol telah lahir sebagai subjek pengetahuan yang aktif dalam pendidikan publik, bukan lagi sebagai objek pasif dari pendidikan.

### **b. Hambatan dan Strategi Serikat Pelajar Jonggol**

Kesadaran masyarakat yang terbentuk oleh hegemoni pendidikan kerap kali menghalangi langkah penerobosan yang dilakukan oleh Serikat Pelajar Jonggol. Penulis melihat manifestasi kesadaran yang dibiarkan oleh hegemoni pendidikan ini dalam hambatan-hambatan yang menerjang aktivitas siswa dalam Serikat Pelajar Jonggol. *Pertama*, persepsi dominan yang menilai aktivitas mereka sebagai kegiatan sia-sia karena membuang waktu siswa untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan jaminan kerja dan masa depan seperti yang dicitrakan oleh pendidikan neoliberal.

Saat ini pendidikan menjadi bagian yang terhubung dengan gejala konsumerisme, utilitas ekonomi pasar bebas, atau yang lebih radikal lagi Freire (1985) memberi julukan terhadap pendidikan hari ini sebagai deposito berjalan, sistem pendidikan “bank” dengan kurikulum “pakai-buang” (Freire, 1985). Dengan kata lain, pendidikan harus menjamin *return* yang lebih dari biaya yang dikeluarkan. Lembaga menyediakan produk yang mahal dengan jaminan prestasi dan masuk perguruan tinggi dengan predikat baik untuk jaminan lapangan kerja. Masyarakat membayar biaya pendidikan yang mahal sebagai “deposit” dengan harapan *return* lebih di kemudian hari. Layaknya sistem “deposit”, kesadaran ini telah memperlihatkan rasionalitas yang kokoh. Kegiatan Serikat Pelajar Jonggol dimaknai sebagai kegiatan yang “sia-sia” karena pendidikan publik yang diinisiasi dan dijalankan dianggap tidak memiliki hubungan apapun dengan jaminan masa depan siswa.

*Kedua*, stigma yang diterima oleh siswa dalam Serikat Pelajar Jonggol. Sebagaimana layaknya

perilaku menyimpang, aktivitas siswa dalam Serikat Pelajar Jonggol menemukan beberapa tindakan represif (berupa nasihat dan teguran) sebagai bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh guru. Satu tahun terakhir, setelah Serikat Pelajar Jonggol mengadvokasikan dua isu sensitif tentang pungutan liar dan kekerasan seksual di sekolah melalui media sosial, berbagai teguran dan ancaman datang dari sekolah anggota komunitas. Salah satu anggota Serikat Pelajar Jonggol yang merupakan siswa sekolah menengah atas bercerita bahwa dirinya diminta berbicara empat mata dengan pihak sekolah lantaran publikasi artikel kajiannya soal urgensi integritas pengelolaan sekolah.

Tentu ini bukan persoalan personal dari guru tersebut, karena guru dalam kacamata Althusser adalah *Repressive State Apparatus* (Escobar, 1998). Jika pendidikan adalah *Ideological State Apparatus* yang memastikan sekolah dan universitas sebagai agen untuk menjaga kepentingan reproduksi kelas sosial dan sosialisasi ideologi, maka guru berperan sebagai aktor dari aparatus negara dalam menjalankan hegemoni itu. Guru memiliki kesadaran yang melekat dalam dirinya untuk menjaga struktur sosial dan mengendalikan semua aktivitas siswa di sekolah, sehingga logis ketika melihat aktivitas siswa dalam Serikat Pelajar Jonggol dan bagaimana pengaruh pendidikan publik terhadap tumbuhnya kesadaran baru, kemampuan berpikir secara bebas, dan kritis dalam diri siswa telah dianggap liar dan tidak sesuai dengan budaya pendidikan di sekolah.

*Terakhir*, kesadaran ini berimplikasi langsung pada daya tarik dan motivasi anggota komunitas yang mudah goyah. Hambatan teknis seperti perlunya pelatihan keterampilan menulis, penelitian, desain grafis, dan jurnalistik untuk memelihara motivasi anggota komunitas direspons dengan baik. Dalam hal ini, Serikat Pelajar Jonggol mengadakan pelatihan *soft skill* kepenulisan dengan portofolio rilisan majalah. Selain itu, penulis melihat relasi antagonisme atau konflik yang dipelihara antara publik “sekolah” dengan Serikat Pelajar Jonggol menjadi hambatan gerak yang lebih bersifat substansial. Caranya memanfaatkan konflik sebagai arena perjuangan adalah strategi yang unik. Serikat Pelajar Jonggol menciptakan media berupa majalah bulanan yang mewadahi semua aspirasi, ide, dan pemikiran komunitas. Menariknya, majalah ini dibuat terbuka dan spesifik mengundang publik

“sekolah” untuk berkontribusi menyampaikan ide, dan pandangannya tentang persekolahan. Strategi ini merefleksikan penumbuhan budaya baru dan pembangunan lingkungan sekolah yang lebih inklusif yang mungkin dilakukan dengan merawat lingkungan sekolah yang kritis.

## SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Hegemoni pendidikan yang terbentuk dari suprastruktur mulai dari kurikulum, relasi *stakeholder*, manajemen, peran guru, dan struktur ekonomi politik mencerminkan bahwa pendidikan semata dijadikan instrumen penundukan siswa bagi kelas yang berkuasa. Hegemoni mengarahkan siswa untuk tunduk pada kepentingan penguasa dan pasar.

Pendidikan publik berjalan sebagai manifestasi keterlibatan siswa dalam mengawal dan memaknai kebijakan pendidikan yang melekat dengannya. Agensi siswa menjadi bukti bahwa siswa sebagai subjek yang aktif dengan melakukan pengorganisasian serta menginisiasi pendidikan publik melalui proses refleksi atas realitas pendidikan yang mereka alami. Terobosan Serikat Pelajar Jonggol ini, pada dasarnya berada pada posisi difusi budaya, pembentukan pengetahuan, serta penyebaran gagasan untuk menerobos belenggu pendidikan.

Serikat Pelajar Jonggol adalah pendidikan publik yang tumbuh sebagai gerakan siswa. Gerakan yang mendorong kesadaran bahwa memiliki pandangan kritis tentang proses pendidikan di sekolah adalah hak warga sekolah. Publik “sekolah” dan pemegang kebijakan sekolah seharusnya mulai melihat bahwa kehadiran komunitas seperti ini adalah kabar baik bagi pertumbuhan budaya baru yang kritis dan inklusif di lingkungan sekolah. Publik “sekolah” dan pemegang kebijakan seharusnya tidak lagi terjebak oleh moral nama baik sekolah yang dengan arogan menghambat tumbuhnya budaya baru yang kritis dan inklusif di lingkungan sekolah.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan, *pertama* satuan pendidikan perlu membangun proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sudah semestinya kegiatan pembelajaran menjadi proses dialektika di lingkungan sekolah, bukan doktrin secara *top down*. *Kedua*, siswa diberi ruang membentuk organisasi seperti serikat

pelajar untuk mengimbangi birokrasi sekolah. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa siswa menjadi subjek dalam kebijakan pendidikan. *Ketiga*, serikat pelajar perlu dilibatkan dalam forum pendidikan, seperti komite sekolah, dewan pendidikan, atau berbagai wadah pemangku kepentingan yang menysar kebutuhan pembelajaran siswa.

## PUSTAKA ACUAN

- Alhamuddin, Fanani, A., Yasin, I., & Murniati, A. (2020). Politics of education in curriculum development policy in Indonesia from 1947 to 2013: A documentary research. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 29–56.
- Aulawi, A., & Srinawati. (2019). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan organisasi untuk meningkatkan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) DI SMK Darus Syifa Kota Cilegon. *Pro Patria Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(1), 38–50.
- Balampekou, M., & Floriotis, G. (2012). Antonio Gramsci, education and science. *Journal for Critical Education Policy Studies*, 10(1), 285–297.
- bekasikinian.com. (2022). Ada pelecehan seksual di SMPN 6 Bekasi, ratusan siswa protes. *Bekasikinian.com*. <https://www.bekasikinian.com/kota-bekasi/pr-3384033599/ada-pelecehan-seksual-di-smpn-6-bekasi-ratusan-siswa-protes>
- detik.com. (2016). Harmonisnya guru SMA 3 Solo dan eks siswa yang bongkar korupsi. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-3291474/harmonisnya-guru-sma-3-solo-dan-eks-siswa-yang-bongkar-korupsi>.
- Escobar. (1998). Whose knowledge, whose nature? Biodiversity, conservation, and the political ecology of social movement. *Journal of Political Ecology*, 5(1): 53-82.
- Faisal, & Martin, S. N. (2019). Science education in Indonesia: past, present, and future. *Asia-Pacific Science Education*, 5(4), 1–29.
- Firah, A. (2021). Evaluasi kebijakan sistem e-voting pemilihan ketua OSIS sebagai media partisipasi demokrasi pada siswa SMK Swasta Tik Darussalam Medan. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 15(4), 443–452.

- Freire, P. (1985). *The politics of education: Culture, power and liberation*. Bergin and Garvey Publishers.
- Gaffney, M. (2008). Participatory action research: An overview what makes it tick? *KAIRARANGA*, 9, 9–15.
- Hadian, T., Mulyana, R., Mulyana, N., & Tejawiani, I. (2022). Implementasi project-based learning penguatan Profil Pelajar Pancasila Di SMAN 1 Kota Sukabumi. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 11(6), 1659–1669.
- Hamdi, I., Soetrisnaadisendjaja, D., & Lestari, R. Y. (2019). Pembentukan nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan organisasi di sekolah. *Untirta Civic Education Journal*, 4(1), 100–120.
- jatim.jpnn.com. (2022). Demo siswa SMA 1 Turen menuntut mutasi kepala sekolah, aturan aneh jadi pemicu. *Jatim.jpnn.com*. <https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/18992/demo-siswa-sma-1-turen-tuntut-mutasi-kepala-sekolah-aturan-aneh-jadi-pemicu>
- Lestari, D. P., & Yani, M. T. (2016). Implementasi budaya demokrasi dalam kegiatan OSIS DI SMPN 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(4), 533–547.
- Lestari, R. Y. (2016). Peran kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan watak kewarganegaraan peserta didik. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2), 136–152.
- Lesungnews90.com. (2021). Memanassal protes siswa : Cabang Dinas Pendidikan Bengkulu Utara turun gunung. *Lesungnews90.Com*. <https://lesungnews90.com/2021/11/memanas-soal-protes-siswa-cabang-dinas-pendidikan-bengkulu-utara-turun-gunung/>
- Liputan6.com. (2015). Dilarang beribadah, siswa SDN 1 Lamongan protes kepala sekolah. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/news/read/2188242/dilarang-beribadah-siswa-sdn-1-lamongan-protes-kepala-sekolah>
- Manojan, K. P. (2019). Capturing the Gramscian project in critical pedagogy: Towards a philosophy of praxis in education. *Review of Development and Change*, 24(1), 123–145.
- Marcus. (1995). Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. *Annual Review of Anthropology*, 24, 95–117.
- Mayo, P. (2014). Gramsci and the politics of education. *Capital & Class*, 38(2), 385–398.
- Mayo, P. (2015a). *Gramsci: Adult education and learning*. In *hegemony and education under neoliberalism insights from Gramsci* (pp. 43–61). Routledge.
- Mayo, P. (2015b). *'In and against the State' Gramsci, a war of position and adult education*. In *hegemony and education under neoliberalism insights from Gramsci* (pp. 62–79). Routledge.
- Mayo, P. (2015c). *The centrality of the state in neoliberal times Gramsci and beyond*. In *hegemony and education under neoliberalism insights from Gramsci* (pp. 29–42). Routledge.
- Momenriau.com. (2019). Tak bisa belajar karena kabut asap, siswa SMA Negeri 1 Bangko protes dan turun kejalan. *Momenriau.com*. <https://momenriau.com/read/detail/1043/tak-bisa-belajar-karena-kabut-asap-siswa-sma-negeri-1-bangko-protes-dan-turun-kejalan>
- Nurdin, M., & Insan, K. (2020). Pendidikan demokrasi pada tingkat sekolah menengah atas (Studi pada pemilihan ketua OSIS Di SMA Negeri 1 Sinjai). *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 10(1), 32–51.
- Nusabali.com. (2022). Siswa dan guru SMPN 5 Denpasar protes kasek sejumlah kebijakan kasek dinilai di luar tupoksi guru. *Nusabali.Com*. <https://www.nusabali.com/berita/127689/siswa-dan-guru-smpn-5-denpasar-protes-kasek>
- Ozer, E. J., Ritterman, M. L., & Wanis, M. G. (2010). Participatory action research (PAR) in middle school: Opportunities, constraints, and key processes. *Am J Community Psychol*, 46, 152–166.
- Pierskalla, J. H., & Sacks, A. (2019). Personnel politics: Elections, clientelistic competition and teacher hiring in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 1–23.
- Postman, N. (1995). *The end of education: Redefining the value of school*. Vintage Books.

- Radarlombok.co.id. (2022). Siswa SMAN 8 protes biaya parkir. *Radarlombok.Co.Id*. <https://radarlombok.co.id/siswa-sman-8-protes-biaya-parkir.html>
- Radarmadura.jawapos.com. (2017). Protes SPP mahal, siswa SMKN 1 Sepulu mogok belajar. *Radarmadura.Jawapos.Com*. <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/21/11/2017/protes-spp-mahal-siswa-smkn-1-sepulu-mogok-belajar/>
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Rahayuningsih, Y. S., & Prihantini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313–6319.
- Rahman, A. (2021). High participation, low impact: The challenge for teacher professional development in Indonesia. *International Journal of Pedagogy and Teacher Education*, 5(1), 1–10.
- Rakyatsulsel.fajar.co.id. (2022). Kepseknya diganti, siswa SMP 1 Pangkajene protes. *Rakyatsulsel.Fajar.Co.Id*. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/07/25/kepseknya-diganti-siswa-smp-1-pangkajene-protes/>
- Rini, R., Ridwan, R., & Hariri, H. (2019). School-based management in Indonesia: decision-making, problems, and problem-solving strategy. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 422, 229–235.
- Rohmah, A. N., & Sari, M. M. K. (2018). Praktik pendidikan demokrasi Di SMAN 4 Bojonegoro dalam membentuk warga negara yang demokratis. *Kajian Moral Kewarganegaraan*, 6(2), 656–670.
- Saputra, I. G. P. E., Sukariasih, L., & Muchlis, N. F. (2022). Penyusunan modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menggunakan Flip Pdf profesional bagi guru SMA Negeri 1 Tirawuta: Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 5, 1941–1954.
- Sulita, D. M. (2019). *Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 4 Teupah Selatan Kab. Aceh Simeulue T.P. 2019/2020*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sunarso, S. (2020). Politics of education in Indonesia: The era of Soekarno, Soeharto, and reformation. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(12), 829–847.
- Tribunnews.com. (2022). Siswa SMKN 1 Boyolangu Tulungagung unjuk rasa protes besaran iuran tingkatan kelas. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/09/05/siswa-smkn-1-boyolangu-tulungagung-unjuk-rasa-protes-besaran-iuran>
- Triwiyanto, T., Kusumaningrum, D. E., & Juharyanto. (2017). Community participation deficits in the implementation of school-based management in Indonesia. *Journal of Education and Practice*, 8(32), 67–74.
- Viva.co.id. (2015). Siswa SMA protes ke Ganjar soal 5 hari sekolah. *Viva.Co.Id*. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/679020-siswa-sma-protes-ke-ganjar-soal-5-hari-sekolah>
- Wibawa, S. (2020). Pemilihan ketua OSIS dalam membangun kesadaran siswa untuk menggunakan hak demokrasi di SMA Negeri 7 Binjai. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 45–53.
- Yanti, N., Adawiah, R., & Matnuh, H. (2016). Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka pengembangan nilai-nilai karakter siswa untuk menjadi warga negara yang baik di SMA Korpri Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 963–970.

